

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Fahmal, Muin. *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. (Dalam Buku MPR: Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia). Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 2017.
- Febriansyah, Reza Fikri. *Revitalisasi Pengaturan Perppu Dalam Bingkai Penataan Regulasi Di Indonesia*. (Dalam Buku MPR: Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia). Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Indarti, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- Khalid. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: CV Manhaj, 2014.
- Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.

- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. *Rekonstruksi Hierarki, dan Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Peraturan Darurat (Dalam Buku MPR: Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia)*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 2017.
- Sihombing, Herman. *Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika, 2015.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. *Argumentasi Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2021.
- Sukriono, Didik. *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*. Malang: Setara Pres, 2013)
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum Filsafat, Teori, dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Widiarto, Aan Eko. *Politik Hukum Pengaturan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Dalam Buku MPR: Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia)*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 2017.

Yamin, Muhammad. *Himpunan risalah-risalah sidang BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945: Dikutip dari Naskah persiapan Undang-undang dasar 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1959.

## **JURNAL:**

Antariksa, Bambang. "Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Deliberatif* Vol 1. No 1. (Juni 2017)

Chandranegara, Ibnu Sina. "Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional antar-lembaga Negara." *Jurnal Yudisial* Vol. 5. No. 1. (April 2012). hal 1, Doi: <https://doi.org/10.29123/jy.v5i1.158>

Hipan, M Marno dan Muhammad Abdi Sabri I Budahu, "Problematika PERPPU Cipta Kerja dalam Peraturan Perundang Undangan." *Jurnal Media Hukum*. Vol. 11 Nomor 1, (Maret 2023). <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.448>.

Muslih, M. "NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas* Volume IV. Nomor 1. (Juni 2013). Doi: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.

Nggilu, Novendri M. "Menggagas Sanksi atas Tindakan *Constitution Disobedience* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*. Vol 16. No. 1. (Maret 2019) doi : <https://doi.org/10.31078/jk1613>.

Putri, Intan Permata dan Mohammad Mahrus Ali. "Karakteristik Judicial order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima." *Jurnal Konstitusi*. Volume 16. Nomor 4. Desember (2019). Doi: <https://doi.org/10.31078/jk16410>.

Siahaan, Mauarar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi." *Jurnal Hukum* No. 3 Vol 16. Juli (2009)

- Simamora, Janpatar. "Multitafsir pengertian "hal ihwal kegentingan memaksa" dalam penetapan Perppu." *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 22. Nomor 1 (2010). <https://doi.org/10.22146/jmh.16208>.
- Sri Darmadi, Nanang. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Vol XXVI*, No. 2, Agustus (2011)
- Sodikin, Miftakhul. "penetapan Alam Sebagai Subjek Hukum." *Jurnal Mengkaji Indonesia*. Volume 2 (1). (Maret). 22. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.219>.
- Soeroso, Fajar Laksano. "PEMBANGKANGAN" TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT." *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 3 (Desember 2013)
- Wijayanti, Winda. "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi*. Volume 10, Nomor 1, (Maret 2013). doi:10.31078/jk.

## **SKRIPSI**

- Wardana, Suheri Anjas. "Pergeseran *Negative Legislature* Dalam Pelaksanaan Kewenangan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi." (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018), hal 40, <https://repository.uin-suska.ac.id/19285/>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPR No.III/MPRS/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Terjemahan R. Subekti dan Tjitrosudibio.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Nomor 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Prp No. 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (lembaran-negara no. 160 tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

### **INTERNET:**

Al Habsy, M Hafiz. "Menolak Pengesahan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." <https://news.detik.com/kolom/d-6644596/menolak-pengesahan-undang>.

[perppu-cipta-kerja-menjadi-undang-undang](#). Diakses pada 22 Februari 2024.

Amnesty Internasional, Pengesahan Perppu Ciptaker Abaikan Aspirasi Rakyat  
<https://www.amnesty.id/pengesahan-perppu-ciptaker-abaikan-aspirasi-rakyat/>,  
Diakses pada 21 Desember 2023.

Azis, Arasy Pradana A. Pengertian *grundnorm* dan *staatsfundamentalnorm*.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-igrundnorm-i-dan-istaatsfundamentalnorm-i-lt5ec227e60ca47>. Diakses pada 17 Desember 2023.

DetikNews. 300 Orang Demonstrasi Gugat UU Pilkada Tak Langsung ke MK. Lalin Macet. <https://news.detik.com/berita/d-2713005/300-orang-demonstrasi-gugat-uu-pilkada-tak-langsung-ke-mk-lalin-macet>. Diakses pada 22 februari 2024.

Hidayat, Rofiq. Alasan Presiden Tak Terbitkan Perppu KPK Dinilai Menyesatkan.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-presiden-tak-terbitkan-perppu-kpk-dinilai-menyestakan-lt5dc122c1a6df5/?page=all>. Diakses pada 22 februari 2024.

Indahono, Bagus. Dua cara agar putusan Mahkamah Konstitusi selalu dipatuhi.  
<https://theconversation.com/dua-cara-agar-putusan-mahkamah-konstitusi-selalu-dipatuhi-134558>. Diakses Pada 28 Desember 2023.

Kbbi.kemdikbud.go.id. s.v. “Hierarki.” diakses online pada 17 Desember 2023.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hierarki>.

Komisi III DPR RI. Peringati ‘May Day’, Nasir Djamil Sebut UU Ciptaker Lebih Berpihak ke Pengusaha.  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44324/t/javascript;#:~:text=Anggota%20Komisi%20III%20DPR%20RI%20Nasir%20Djamil%20menilai%20>

[Undang-Undang, kepada pengusaha dibandingkan ke pekerja](#). Diakses pada 22 februari 2024

Limanseto, Haryo. Tingkatkan Meaningful Participation, Pemerintah Lakukan Konsultasi Publik RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4909/tingkatkan-meaningful-participation-pemerintah-lakukan-konsultasi-publik-ruu-penetapan-perppu-cipta-kerja>. Diakses pada 21 Desember 2023.

Mahkamah Konstitusi. Daniel Yusmic: Pengujian Perpu Merupakan Perkembangan Kewenangan MK. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16589&menu=2#:~:text=Namun%20sejak%202009%20ada%20permohonan,tersebut%20dapat%20dilakukan%20uji%20materiil>. Diakses Pada 6 Februari 2024.

Mahkamah Konstitusi. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11767#:~:text=Berdasarkan%20latar%20belakang%20sejarah%20pembentukan,hukum%20dan%20politik%20Ketanegaraan%20modern>. Diakses Pada 27 Desember 2023.

Mahkamah Konstitusi. Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>. Diakses Pada 28 Desember 2023.

Pudjianti, Handriani. Senin, WNI di New York Akan Demo RUU Pilkada. <https://nasional.tempo.co/read/610385/senin-wni-di-new-york-akan-demo-ruu-pilkada>. Diakses Pada 22 februari 2024.

Prasetyo, Aji. Ramai-ramai Menolak RUU KPK. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ramai-ramai-menolak-ruu-kpk-1t5d7932c71df42/>. Diakses Pada 22 februari 2024.

Sujatnika, Ghunarsa. Perppu Cipta Kerja Kado Akhir Tahun Yang Tak Diinginkan.

<https://law.ui.ac.id/perppu-cipta-kerja-kado-akhir-tahun-yang-tak-diinginkan-oleh-ghunarsa-sujatnika/>. Diakses Pada 20 Desember 2023.

Wardah, Fathiyah. Presiden Didesak Terbitkan Perppu KPK.

<https://www.voaindonesia.com/a/presiden-didesak-terbitkan-perppu-kpk/5113600.html>. Diakses Pada 15 Desember 2023.